

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Hasil dari penulisan yang dilakukan oleh Mubyarto (Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia-Pasca Krisis:95-100) di kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan judul "Prospek Sektor pada Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia", pasca krisis ekonomi berdasar analisis Shift-Share.

Potensi ekonomi kabupaten Kotabaru dapat dilihat dari sumbangan sektoral terhadap PDRB, yang masih menempatkan sektor pertanian pada posisi teratas. Empat sektor unggulan lainnya adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor industri pengolahan.

Sektor-sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 1998 adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran sementara sektor-sektor lainnya mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 menunjukkan hanya 3 sektor yang mengalami pertumbuhan, yakni pertanian 23.4%, pertambangan dan penggalian 28.0%, dan perdagangan, hotel dan restoran 16.7%. Sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami penurunan pada puncak krisis ekonomi tahun 1998. Pertumbuhan negatif terbesar dialami oleh sektor bank dan lembaga keuangan lain

sebesar 53.3%, disusul sektor bangunan -51.3%, sektor jasa -30.3%, sektor listrik, gas dan air bersih -27.1%, sektor pengangkutan dan komunikasi -2.8% dan sektor industri pengolahan -1.2%.

Pada tingkat nasional tercatat pertumbuhan sektor-sektor PDRB -14% pada tahun 1998, maka kabupaten Kotabaru mencatat pertumbuhan positif pada tahun 1998, sebesar 7.64% termasuk pertambangan, dan 2.09% tanpa pertambangan. Dengan angka pertumbuhan tersebut terlihat betapa besar peranan tambang dalam perekonomian daerah Kotabaru . Sayangnya pertambangan batubara pada Mei 2000 sedang menghadapi masalah rumit, terutama pertambangan rakyat dan bahkan ada kemungkinan eksploitasi tambang batubara akan ditutup. Secara absolut dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 1993 nilainya adalah Rp.1463 Milyar, naik 7.63% dari tahun 1997 sebesar Rp.1359 Milyar.

Begitu pula dalam penelitian Muhariyanto (1999) dengan "Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" pada masa periode tahun 1992-1997. Diterangkan pada hasil analisa tersebut dengan menggunakan analisis Shift-Share disimpulkan diperoleh 7 sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif yakni pada sektor: pertanian; pertambangan; industri pengolahan; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan sektor jasa lainnya. Ke 7 sektor ekonomi tersebut dijadikan sektor unggulan bagi kegiatan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama dalam menunjang perekonomian regional. Struktur perekonomian daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta bertumpu pada sektor jasa lainnya sebagai penggerak sektor-sektor pembangunan lainnya atau menjadi base ekonomi.

Sedangkan penelitian lainnya yakni oleh Heriyanto (1999) dengan “ Analisa Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Jambi periode 1988-1997 ”.

Berdasarkan analisa Shift Share menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi jambi adalah positif. Demikian juga dilihat dari pengaruh komponen pertumbuhan nasional, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Jambi pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan kontribusi sektor-sektor ekonomi secara nasional.

Serta pada analisa dari penelitian Sri Kusriniti Yuniarti (1997) “ Arah Pergeseran Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta ”.

Berdasar dari hasil analisa Shift-Share yang dilakukan tampak bahwa dalam PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sektor yang menjadi basis ekonomi atau sektor unggulan adalah sektor jasa dan sektor industri pengolahan. Selain itu dari analisa Shift-Share tampak pula ketidakunggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari perubahan pendapatan didaerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak setara dengan pertumbuhan nasional, dijumpai pada sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan perusahaan. Jadi ada 3 sektor dari 9 sektor ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkembang lebih lambat dari laju pertumbuhan nasional rata-rata sektor ini. Dan Sri Kusrini menemukan telah terjadi pergeseran dalam posisi kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dari sektor pertanian ke sektor industri.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1 Defenisi Perencanaan Ekonomi

Istilah perencanaan pembangunan (ekonomi) sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan memberikan pengertian yang berbeda-beda, dan diantara para ekonom pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan ekonomi tersebut.

Menurut Conyers & Hills (1994) perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi diatas berarti ada empat elemen dasar perencanaan (Arsyad,1999.hal.122) yaitu :

- a. merencanakan berarti memilih.
- b. perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya.
- c. perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
- d. perencanaan untuk masa depan.

Arthur Lewis dalam bukunya yang berjudul *Development Planning* (1966) membagi perencanaan dalam 6 pengertian yaitu :

1. istilah perencanaan seringkali dihubungkan dengan letak geografis, bangunan tempat tinggal, bioskop dan lainnya. Di negara sedang berkembang hal ini

sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan negara (*town and country planning*) atau perencanaan kota dan daerah (*urban and regional planning*).

2. perencanaan mempunyai arti keputusan penggunaan dana pemerintah dimasa yang akan datang.
3. ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumberdaya manusia, bahan baku, dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah.
5. penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumberdaya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.
6. untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Maka pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan (soekartawi,1990) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada.

2. Perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.
3. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan masyarakat banyak.
4. Perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang harus dicapai.
5. Perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa depan.

Walaupun tidak ada kesepakatan diantara para ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, sebagian besar ekonom menganggap perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula (*Lincoln Arsyad, 1999*).

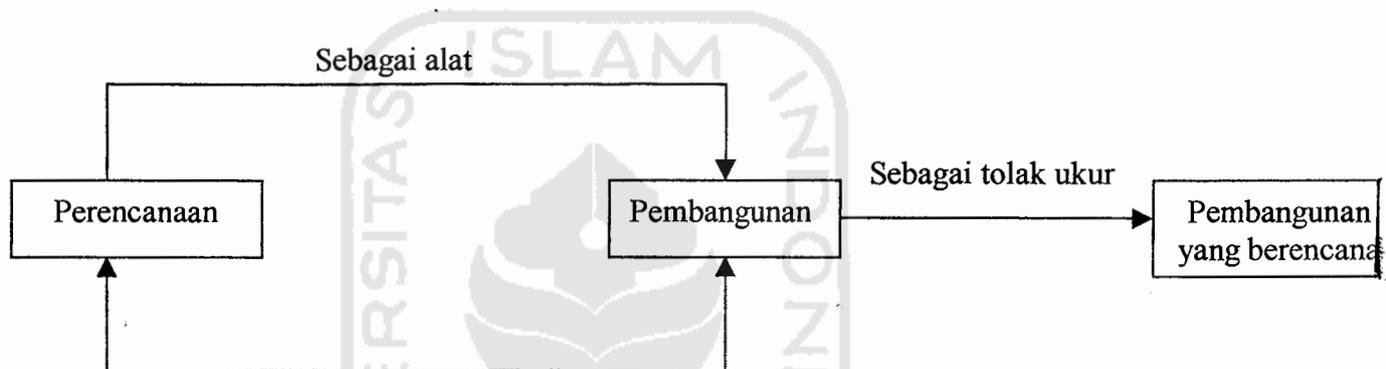
4.2. Fungsi Perencanaan Ekonomi

Dalam beberapa buku literatur perencanaan pembangunan (*Development Planning*), maka pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan dengan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembahasan pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik utama, yaitu :

- a. Perencanaan sebagai alat dari pembangunan.
- b. Pembangunan sebagai tolok-ukur dari berhasil tidaknya pembangunan tersebut.

Secara skematis, kaitan antara aspek perencanaan dan pembangunan dapat digambarkan seperti gambar 4.1 dibawah ini

Skema kaitan Antara Perencanaan dan Pembangunan



Gambar 4.1

Perencanaan dianggap sebagai alat pembangunan karena perencanaan memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakan (tidak sistematis) dan tidak memperhatikan aspirasi *target group* (sasaran), maka pembangunan yang dihasilkan juga tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian maka didalam konteks perencanaan sebagai alat maka ia mempunyai keunggulan komprehensif sebagai berikut.

- a. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat penentuan berbagai alternatif dan berbagai kegiatan pembangunan.
- c. Perencanaan dapat dipakai sebagai penentuan skala prioritas
- d. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat peramalan (*forecasting*) dari kegiatan pada masa yang akan datang.

Sementara menurut Lincoln Arsyad fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut

- a. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
- e. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

4.3. Proses Perencanaan Ekonomi

Proses perencanaan merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan oleh para pembuat keputusan (perencana), adapun proses perencanaan ekonomi tersebut dibagi kedalam empat tahap diantaranya adalah :

Tahap pertama, dimana pada tahap ini ditetapkan tujuan oleh para pemimpin politik, serta prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi konflik tujuan. *Tahap kedua* adalah mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut. Pada *tahap ketiga* hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada *tahap terakhir* perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (*welfare function*) tanpa terganggu adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (*Development strategy*) atau rencana mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun biasanya lima tahun (Lincoln Arsyad, 1999).

4.4. Syarat-Syarat Keberhasilan Suatu Perencanaan

Menurut Jhingan (1983) perumusan dan kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan hal-hal sebagai berikut

- a. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat.

- b. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya, oleh karena itu pembentukan suatu jaringan kantor statistik dari pusat hingga daerah yang bertugas mengumpulkan informasi dan data-data statistik menjadi suatu kebutuhan utama.
- c. Penetapan berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut.
- d. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral.
- e. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia.
- f. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian.
- g. Administrasi yang baik, efisien, dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan.
- h. Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya.
- i. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintahan.

- j. Administrasi bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat.
- k. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan didalam suatu negara yang demokratis, tanpa dukungan masyarakat tak ada perencanaan yang dapat berhasil.

4.5 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pada sub bab ini akan dibahas teori-teori mengenai faktor-faktor yang menimbulkan dan menentukan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. adapun teori-teori tersebut dapat disimak pada uraian seagai berikut :

4.5.1. Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional kemasyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi

pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya.

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai sebagai suatu "*fungsi tujuan*" pada akhirnya harus tunduk pada "*fungsi kendala*" yaitu keterbatasan sumberdaya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tersebut, bahkan dalam perkembangannya hal tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. (Mudrajad Kuncoro, 1997).

4.5.2. Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam 5 tahap yaitu : masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), tinggal landas (*take off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*).

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan proses yang multidimensial. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan sektor industri saja. Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti suatu proses yang menyebabkan antara lain :

- a. perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
- b. perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
- c. perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah) menjadi investasi yang produktif.
- d. perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya perubahan sikap yang tadinya kurang menghargai waktu, kurang menghargai prestasi perorangan dan sebagainya).

Adapun 5 tahap proses pembangunan ekonomi tersebut adalah :

- a. masyarakat tradisional

Menurut Rostow yang dimaksud dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi

yang relatif masih primitif yang didasarkan pada ilmu-ilmu dan teknologi pra-Newton dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun-temurun.

Dalam suatu masyarakat tradisional, menurut Rostow, tingkat produktivitas perkapita masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini, struktur sosialnya masih bersifat hirarkis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinan sangat kecil. Sementara itu kegiatan politik dan pemerintahan pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah berada ditangan tuan tanah yang ada di daerah tersebut. Kebijakan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan para tuan tanah di daerah tersebut.

b. Prasyarat tinggal landas

Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*self sustained growth*), menurut Rostow pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

c. Tinggal landas

d. Tahap menuju kedewasaan

e. Tahap konsumsi tinggi.

4.5.3 Friedrich List

Menurut List, dalam bukunya yang berjudul *Das nationale der politisvhen oekonomie* (1840), sistem liberalisme yang *laize-faire* dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya sangat tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan perorangan. List juga menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah diantara masyarakat.

Perkembangan ekonomi menurut List, melalui 5 tahap yaitu tahap primitif, beternak, pertanian dan industri pengolahan (*manufacturing*), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkan pada cara produksinya.

Selain itu List, juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien. Akhirnya, sektor industri pengolahan sangat perlu dikembangkan dalam pembangunan ekonomi, walaupun pada awalnya perlu diberikan proteksi, terutama pada industri yang baru berkembang (*infant industri*). Dilain pihak sektor pertanian tidak perlu diberi proteksi sebab sektor pertanian akan mendapatkan manfaat dengan sendirinya dari pertumbuhan industri.

4.5.4. Harrod- Domar

Teori Harrod-Domar menganalisis syarat yang diperlukan agar perekonomian tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Adapun teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu :

1. perekonomian berada dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. kecenderungan untuk menabung (MPS) besarnya tetap demikian juga antara modal-output (COR) dan rasio pertambahan modal-output (ICOR).

Setiap perekonomian menurut Harrod-Domar dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untum menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Rasio modal-output (COR) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

4.6. Pembangunan Regional dan Sektoral

4.6.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

(Lincoln Arsyad, 1999, hal.298)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (*Lincoln Arsyad, 1999*).

.4.6.2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

4.6.2.1. Teori Ekonomi Neoklasik

Menurut teori ini ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah.

4.6.2.2. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakan mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

4.6.2.3. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

4.6.2.4. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori kausasi kumulatif (*cumulative causation*). Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah maju dan terbelakang. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya (*Lincoln Arsyad, 1999*).

4.6.3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan seperti yang diutarakan dimuka tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif karena masalah pembangunan ekonomi daerah begitu kompleks.

Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan disini untuk kepentingan perencanaan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 4.1

Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen	Konsep lama	Konsep baru
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga - lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

(Lincoln Arsyad, 1999)

4.6.4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

4.6.5. Perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah

Para ahli ekonomi menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang (NSB), mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada.

(*Lincoln Arsyad, 1999*).

4.6.6. Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah :

Pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat

berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

4.6.7. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (1989) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah seperti yang disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2

Tahapan Dan Kegiatan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap	Kegiatan
I	Pengumpulan dan analisis data * Penentuan Basis ekonomi * Analisis struktur tenaga kerja * Evaluasi kebutuhan tenaga kerja * Analisis peluang dan kendala pembangunan * Analisis kapasitas kelembagaan
II	Pemilihan strategi pembangunan daerah * Penentuan tujuan dan kriteria * Penentuankemungkinan-kemungkinan tindakan * Penyusunan strategi
III	Pemilihan proyek-proyek pembangunan * Identifikasi proyek * Penilaian Viabilitas proyek
IV	Pembuatan rencana tindakan * Pra penilaian hasil proyek * Pengembangan input proyek * Penentuan alternatif sumber pembiayaan * Identifikasi struktur proyek